BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbagai upaya pengentasan kemiskinan di berbagai negara berkembang seperti di Asia dan Afrika mengalami transformasi baik dalam tataran konsep maupun implementasinya. Hal ini seiring adanya kegagalan-kegagalan yang terjadi pada implementasi program pengentasan kemiskinan, dimana kemiskinan masih saja menjadi persoalan bagi negara-negara berkembang. Kondisi ini disebabkan karena kemajuan negara-negara berkembang mengambil standar atau ukuran-ukuran kualitatif dan kuantitatif di negara-negara maju (Eropa Barat dan Amerika Utara) yakni, proses pembangunan yang mengambil bentuk atau pola serta standar normatif dan orientasi nilai budaya barat sebagai parameter kemajuan tunggal.

Konsep modernisasi dengan mengacu pada negara-negara maju di Eropa Barat dan Amerika Utara ini membawa konsekuensi yang sangat luas terhadap kehidupan sosial-ekonomi-politik dan budaya di negara yang sedang berkembang. Konsekuensi tersebut timbul karena pembangunan semata-mata mengambil pola replikasi dan imitasi secara totalitas atas gaya hidup, tata kelembagaan, ekonomi dan sosial, tata pemerintahan, sistem ketatanegaraan dan hukum serta mekanisme-mekanisme produksi-distribusi ekonomi tanpa pertimbangan akan kesesuaian pada setting sosio-budaya lokal pada negara-negara berkembang.

Konsep modernisasi merupakan pembangunan yang dimaknai sebagai proses dinamik transformasi sosial-ekonimo-kultural yang secara sengaja dan terencana dijalankan untuk mengubah status ketertinggalan menuju kemajuan yang lebih mapan dan modern. Perubahan yang sengaja dan terencana itu menganggap sistem sosial-budaya dan ekonomi pada negara-negara berkembang sebagai sistem yang tradisional sedangkan bagi negara-negara maju, sistem yang maju adalah yang modern. Akibatnya pembangunan berpolakan modernisasi ternyata telah meminggirkan posisi ekonomi masyarakat lokal karena menafikan eksistensi sistem sosio-budaya masyarakat lokal, sehingga bukan kemajuan yang

Puji Hadiyanti, 2017
PENDEKATAN KELOMPOK DALAM PEMBERD……MASYARAKAT
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dihasilkan dari proses modernisasi melainkan kemandegan (Dharmawan, 2006, hal. 5).

Menurut Soetomo (2013, hal.65) yang mengutip Chambers (1983), Harrison (1995), Burkey (1993), Esman and Uphoff (1984), atas dasar pengalaman para ahli tersebut dalam proses pembangunan pedesaan dan program pengentasan kemiskinan di negara-negara Asia dan Afrika. Disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab kegagalan program pengentasan kemiskinan adalah: (1) Karena pendekatan 'target' dan *'top-down'*; (2) Pengabaian nilai-nilai lokal dan bias '*outsiders'*; (3) Kurangnya partisipasi; dan (4) Pendekatan yang tidak holistik.

Dalam pendekatan yang bersifat *top down*, model perencanaan yang digunakan adalah perencanaan yang dibuat secara terpusat oleh para perencana profesional yang merupakan aparat pemerintahan dimana perencanaan lebih banyak didasarkan pada asumsi-asumsi diatas meja. Apabila dalam prosesnya seolah-olah merupakan proses perencanaan dari bawah namun kenyataannya sudah tersedia instrumennya dan hanya sekedar retorika yang bersifat prosedural bukan substansial. Dalam hal pendekatan 'target' dan *'top-down'*, program pengentasan kemiskinan seringkali menetapkan tujuan tanpa melibatkan kelompok miskin itu sendiri.

Selain bersifat *top down*, perencanaan yang dibuat memiliki keseragaman, padahal pola pelaksanaan pembangunan masyarakat yang cocok dan berhasil diterapkan dalam masyarakat tertentu, tidak ada jaminan untuk berhasil dalam masyarakat lain yang berbeda kondisinya. Disinilah terjadi pengabaian nilai-nilai lokal dan bias *outsiders*. Chambers (1983, hal.45) secara persuasif mengungkapkan isu sekitar pengabaian nilai-nilai lokal dengan istilahnya "*outsiders'* bias" (waktu, tempat, dan iklim) atau "turis pembangunan pedesaan - *rural development tourist*". Disisi lain adanya pengabaian nilai-nilai lokal mengakibatkan keterlibatan masyarakat/partisipasi sangat rendah karena sistem sosial yang dibawa oleh “turis pembangunan pedesaan” berbeda dengan sistem sosial masyarakat penerima program. Di samping itu belum ada sinergitas antar pelaku pembangunan sehingga pelaksanaan program dalam upaya pengentasan kemiskinan tidak bersifat holistik.

Di Indonesia dinamika model pembangunan dalam upaya pengentasan kemiskinan bagi setiap individu maupun masyarakat luas mengalami perubahan dari masa ke masa sejalan dengan regulasi formal yang mengatur hal tersebut. Dimulai dari krisis ekonomi yang terjadi tahun 1997, pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan Memantapkan Program Menghapus Kemiskinan (MPMK) yang dicanangkan sejak tahun 1997, kemudian pada tahun 1998 pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 21 tahun 1998 tentang Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan disingkat dengan GARDUTASKIN. Intinya adalah menginstruksikan kepada semua instansi dan kelompok masyarakat yang terkait dengan penanganan kemiskinan supaya secara bersama-sama mengambil langkah-langkah kongkrit secara bersama-sama dan berkoordinasi di dalam menanggulangi kemiskinan. Melalui instruksi ini, berbagai upaya penanggulangan kemiskinan di tata dan di susun kembali dalam suatu sistem yang lebih terpadu dan menyeluruh. Berbagai hambatan prosedur dan birokrasi yang selama ini dianggap dapat mengurangi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dihilangkan.

Pelaksanaan dari Instruksi Presiden tentang GARDUTASKIN ini dilakukan dengan berbagai pendekatan dan memunculkan berbagai program di masyarakat, antara lain program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), Tabungan Kesejahteraan Rakyat (Takesra), Perkebunan Inti Rakyat (PIR), Kelompok Belajar Usaha (KBU), Kelompok Masyarakat (Pokmas) untuk IDT, Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS), Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang dilaksanakan Kementrian Dalam Negeri, Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang dilaksanakan Kementrian Pekerjaan Umum, Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K) yang dilaksanakan Kementerian Pertanian dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dilaksanakan Kementerian Sosial. Selain itu terdapat pendekatan *Social Security Sistem*-Jaring Pengaman Sosial dengan menggulirkan program seperti raskin, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan kompensasi BBM.

Tabel berikut merupakan gambaran pendekatan dalam upaya penanggulangan kemiskinan seperti yang telah diuraikan di atas:

Pendekatan	Asumsi	Sasaran	Sebab-sebab kegagalan pendekatan ini di lapangan
Pemenuhan Kebutuhan Dasar (*basic needs)* memunculkan program : P2WKSS, PKK, P4K, UPPKA	Kebutuhan dasar (gizi, air bersih, pendidikan, perumahan) adalah prasyarat minimal yang harus dipenuhi bagi kebutuhan survival	Lapisan miskin di pedesaan dan kelompok rentan	Seringkali temporer dan tidak terkawal dengan baik sehingga mengalami diskontinuitas
Penyesuaian struktural, memunculkan program misal Takesra, KBU, KUBE	Masyarakat miskin (desa) memerlukan bangun struktur kelembagaan perekonomian yang kuat sebagai pijakan keluar dari jerat kemiskinan	Unit-unit perekonomian desa	Nilai-nilai pelaku ekonomi masyarakat desa berbeda dengan nilai-nilai yang diperlukan pada sistem kapitalistik di aras makro
Partnership, misal program: PIR-"bapak angkat"	Konflik antar lapisan ekonomi (kuat melawan lemah) diredam melalui kerjasama produksi	Pengusaha skala kecil dan petani skala kecil	Dominasi lapisan kuat atas lapisan lemah dan adanya ketidaksesuaian etika kerja antara pengusaha dengan sistem kapitalis melawan petani-kecil
Social Security Sistem, misal program raskin, bantuan langsung tunak dan kompensasi BBM	Mengurangi beban lapisan masyarakat miskin atas adanya suatu kebijakan publik	Masyarakat lapisan miskin	Temporer, tidak terstruktur dengan baik.

Sumber: Diadaptasikan dari Dharmawan (2006, hal.5)

Tabel 1.1 Pendekatan dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Berbagai kebijakan program pengentasan kemiskinan yang telah dijalankan pemerintah tersebut tidak serta merta menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Belajar dari kondisi yang ada, maka konsep pengentasan kemiskinan oleh pemerintah mengalami perubahan. Perubahan konsep tersebut adalah konsep penanggulangan kemiskinan secara terpadu dengan basis pemberdayaan masyarakat dimana melalui program yang diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Palu pada tanggal 1 Mei 2007 yang bernama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dengan tujuan meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat. Program ini merupakan salah satu program utama pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, selain program-program lain yang telah ada, seperti Raskin, Askeskin, pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan bahan bakar nabati dan energi alternatif, peningkatan ketahanan pangan, sertifikasi tanah bagi masyarakat miskin (Sinar Harapan, 26 April 2007).

Konsep pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat digunakan karena diyakini sumber masalah kemiskinan dan keterbelakangan adalah ketidakberdayaan. Pemberdayaan yang diadaptasikan dari istilah *empowerment* berkembang di Eropa mulai abad pertengahan, terus berkembang hingga diakhir 70-an, 80-an, dan awal 90-an. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat, karena pelaksanaan pembangunan masyarakat yang menggunakan pemberdayaan, bukan lagi menggunakan sistem instruksi dan komando, melainkan mengedepankan pengambilan keputusan oleh masyarakat sendiri, sehingga tercipta partisipasi di dalam masyarakat yang dalam istilah Chambers (1995, hal.23) adalah *People Centered Development.*

Pemberdayaan sebagai konsep alternatif pembangunan menekankan pada otonomi pengambilan keputusan suatu kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, partisipasi, demokrasi, dan pembelajaran sosial melalui

pengalaman langsung (Sumodiningrat 2007, hal.79). Pandangan ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan merupakan sebuah proses *depowerment* dari system kekuasaan yang mutlak-absolut.

Dalam perspektif politis, Ife (2002, hal.80) menyatakan bahwa pemberdayaan berhubungan dengan usaha untuk memahami sifat power dalam masyarakat modern dan dapat dibagi ke dalam empat perspektif : pluralis, elit, struktural, dan poststruktural. Konsep pemberdayaan tidak hanya pada aras individu, tetapi juga secara kolektif, karena itu menurut Pranarka dan Vidyandika (1996, hal.17), konsep pemberdayaan pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif-efisien secara struktural, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional maupun internasional, pada bidang politik, ekonomi, hukum, dan lainnya.

Namun pada realitasnya konsep pemberdayaan inipun belum mampu menanggulangi masalah kemiskinan baik di negara-negara Asia maupun di negara-negara Afrika. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Joyce Selome dan Nevel Tshuma pada tahun 2014 mengenai *Microfinance and Women Empowerment in Zimbabwe* menunjukkan bahwa adanya pemberdayaan masyarakat pada kaum perempuan melalui program/proyek "Dana Pengembangan Perempuan" dengan pendekatan kredit mikro yang dilakukan oleh pemerintah setempat menyebabkan orang miskin menjadi berhutang daripada membantu mereka keluar dari kemiskinan. Hal ini disebabkan penerima kredit mikro gagal untuk membayar dana karena kurangnya keuntungan dari usaha peternakan yang dilakukan dan tidak adanya pendampingan, ditambah lagi adanya penghentian program/proyek peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh pemerintah setempat, sehingga mereka meminjam dari pemberi pinjaman lokal lainnya untuk membayar kredit mikro mereka.

Temuan ini sejalan dengan pandangan dari Bateman dalam hasil penelitiannya pada tahun 2011 mengenai *Microfinance and Development: Risk and Return from a Policy Outcome Perspective* di India yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat miskin melalui program kredit mikro telah mendorong orang miskin untuk mengambil pinjaman dari kreditur uang lokal hanya untuk

dapat membayar kembali pinjaman keuangan mikro yang mereka terima. Hal ini disebabkan karena uang dari kredit mikro tidak mencukupi untuk menambah modal dan untuk membeli obat dari dokter hewan demi keberlangsungan usaha peternakan yang dilakukan sehingga mengakibatkan rendahnya produktivitas usaha peternakan yang dilakukan, lebih lagi peruntukan kredit mikro yang diterima dialihkan penggunaannya.

Adapun di Indonesia dalam prakteknya, proyek transformasi sosial penanggulangan kemiskinan yang selama ini dijalankan dengan berbasis pada pemberdayaan masyarakat mengalami pula kegagalan, sehingga untuk mempercepat pemberantasan kemiskinan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 2010 dibentuklah Tim Nasional Percepatan Penanggulanngan Kemiskinan (TNP2K) yang bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia dan diketuai oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. TNP2K ini adalah sebuah lembaga yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan. Tugas dari TNP2K ini yaitu menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan di kementrian/lembaga.

Namun demikian hasil penelitian yang dilakukan oleh Dhalimunte (2014) tentang “Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan Berbasis Potensi Diri di DKI Jakarta” menunjukkan bahwa angka kemiskinan khususnya di DKI Jakarta masih relatif tinggi. Hal ini dikarenakan tugas yang diemban oleh TNP2K untuk menurunkan angka kemiskinan khususnya di kota DKI Jakarta belum berhasil dilaksanakan. Penyebabnya adalah program-program penanggulangan kemiskinan yang ada masih berjalan sendiri-sendiri menurut kebijakan kementerian yang bersangkutan, tidak terintegrasi, parsial dan sektoral sehingga terdapat kesamaan program. Lebih jauh dikatakan bahwa program penanggulangan kemiskinan khususnya melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri hanya terfokus pada bina fisik yaitu pembangunan infrastruktur dan sarana umum, yaitu dengan penambahan adanya pemberian

kredit kepada masyarakat miskin untuk usaha mikro. Pendekatan yang dilakukan dalam PNPM-Mandiri inipun hanya bersifat pada pemberian bantuan, belum kepada upaya pengembangan sumber daya manusia dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Disisi lain hasil penelitian yang dilakukan oleh Husni Thamrin tahun 2006 mengenai "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendekatan Kelompok Kasus Pengelolaan Hutan Bersama Pada Areal Hutan Produksi di Bogor" menunjukkan bahwa terdapat pula pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat mengalami keberhasilan, yang ditentukan oleh berbagai faktor. faktor-faktor tersebut adalah (1) proses awal berdirinya kelompok, (2) kemampuan mengumpulkan sumber daya, (3) kemampuan melakukan kegiatan yang dilakukan dan (4) kemampuan menyelaraskan diri dan membuat relasi. Hal ini sejalan dengan pemikiran Kindervatter (1979, hal.79) berdasarkan hasil penelitian di Indonesia dan Thailand bahwa ciri-ciri dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah: (1). Pembentukan kelompok kecil, (2) Pemberian tanggung jawab kepada peserta didik, dilibatkan dalam kegiatan perencanaan, penyusunan program dan evaluasi program, (3) Kepemimpinan kelompok dipegang peserta didik, (4) Agen, tutor, guru berperan sebagai fasilitator, (5) Proses pengambilan keputusan untuk setiap kegiatan harus berdasarkan pada musyawarah, (6) Adanya kesamaan pandang dan langkah dalam mencapai tujuan tertentu, (7) Metode pembelajaran yang digunakan harus dipilih dan dapat menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik, (8) Bahan belajar diarahkan pada kebutuhan sehari-hari peserta didik.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian dan kajian yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikatakan bahwa faktor-faktor penyebab kegagalan pemberdayaan masyarakat, *Pertama:* adanya pemaknaan yang salah kaprah terhadap konsep pemberdayaan dari pelaku pemberdayaan sehingga dalam implementasinya, pendekatan yang dilakukan yakni pemberian kredit mikro dan bina fisik dikatakan pemberdayaan masyarakat, padahal dalam proses pemberdayaan masyarakat harus menempatkan kekuatan masyarakat sebagai modal utama serta menghindari intervensi atau rekayasa pihak luar yang mengakibatkan kemandegan. *Kedua*, kurangnya reorientasi terhadap pelaku

pemberdayaan dalam makna pemberdayaan mengakibatkan praktek yang terjadi bukan perubahan substansial melainkan sekedar perubahan prosedural dan perubahan kemasan. Kemasan dan proseduralnya pemberdayaan masyarakat, namun isinya masih pendekatan lama yakni pemberian bantuan dan perbaikan infrastruktur. *Ketiga*, adanya pendekatan pemberian bantuan dan bina fisik yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat mengakibatkan ketergantungan dan menurunkan kreativitas masyarakat sehingga menjadi suatu kebiasaan, yakni program yang telah digulirkan akan berlanjut apabila ada bantuan baik dari pemerintah maupun pihak lain (eksternal). Faktor-faktor tersebut merupakan sebagian dari penyebab kegagalan dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat.

Adapun faktor-faktor penyebab keberhasilan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat adalah: *Pertama*, pelaku pemberdayaan memahami secara komprehensif makna dari pemberdayaan sehingga pendekatan yang dilakukan pun sesuai dengan prinsip pemberdayaan itu sendiri yaitu melalui pembentukan kelompok aksi sosial. *Kedua*, adanya *institution* baru dari struktur yang ada di masyarakat yakni terbentuknya kelompok-kelompok aksi sosial sebagai prasyarat bagi semakin tumbuhnya kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pembangunan. Hal ini berdampak pada pengembangan kapasitas masyarakat dan sekaligus wujud dari keberlanjutan karena berbagai aktivitas masyarakat akan tetap berlangsung walaupun pemberian bantuan/fasilitas dari pihak eksternal dihentikan. *Ketiga*, adanya proses belajar sosial, dimana dalam proses belajar sosial tersebut kewenangan dan peningkatan kemampuan dikendalikan oleh masyarakat/kelompok itu sendiri. Hal ini dibutuhkan karena walaupun masyarakat memiliki kewenangan untuk membuat keputusan dan merencanakan pembangunannya secara mandiri, namun bila masyarakat belum atau tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan perencanaan pembangunan maka kewenangan yang dimiliki tidak memiliki makna.

Secara garis besar berbagai faktor penyebab kegagalan dan keberhasilan pemberdayaan masyarakat terdapat pada tabel berikut ini:

Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan Pemberdayaan Masyarakat	Faktor-faktor Penyebab Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat
1. Pemaknaan yang salah kaprah pada pelaku pemberdayaan terhadap konsep pemberdayaan	Pelaku pemberdayaan memahami secara komprehensif makna dari pemberdayaan sehingga pendekatan yang dilakukan dalam proses pemberdayaan sesuai dengan prinsip pemberdayaan.
2. Kurangnya reorientasi terhadap pelaku pemberdayaan dalam makna pemberdayaan	Adanya *institution* baru dari struktur yang ada di masyarakat
3. Pendekatan pemberian bantuan dan bina fisik yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat mengakibatkan ketergantungan dan menjadi suatu kebiasaan.	Adanya proses belajar sosial, dimana dalam proses belajar sosial tersebut kewenangan dan peningkatan kemampuan dikendalikan oleh masyarakat/kelompok itu sendiri

Sumber: 2016, Berbagai Hasil Penelitian dan Kajian (diolah).

Tabel 1.2 Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan dan Keberhasilan Pemberdayaan

Dari tabel 1.2 terlihat dengan jelas bahwa upaya pengentasan masalah kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat sebagai arus utama pembangunan saat ini masih menyisakan berbagai persoalan yang memerlukan pembenahan secara masif oleh pihak-pihak terkait. Bahkan DKI Jakarta sebagai barometer keberhasilan pembangunan juga menghadapi permasalahan kemiskinan yang masih belum terselesaikan. Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta merilis bahwa pada bulan Maret 2014, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran perkapita di bawah garis kemiskinan) di DKI Jakarta mencapai 398.980 orang (3,92%), meningkat sebesar 22,3 ribu orang (0,20 poin) dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan September 2013 yang sebesar 371.700 orang (3,72%). Jika dibandingkan dengan bulan maret 2013, penduduk miskin bertambah sebesar 41.020 orang (0,37%).

Disisi lain kondisi DKI Jakarta saat ini tidak hanya pada masalah kemiskinan dan keterbelakangan saja. Terdapat berbagai masalah yang bersifat global seperti masalah lingkungan. Masalah lingkungan muncul karena salah satu penyebabnya yaitu sampah dan pengelolaan sampah yang cenderung belum ada upaya penanggulangan yang komprehensif. Jumlah sampah di DKI Jakarta saat ini semakin bertambah, tercatat 7.000 ton perhari yang dihasilkan, 90 persennya adalah sampah rumah tangga dan pasar, sisanya berasal dari alam seperti pohon dan ranting. Dari 7000 ton tersebut diangkut oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta sebesar 5200 sampai 5500 ton perhari, sisanya diolah oleh sebagian warga melalui kelompok daur ulang sampah dengan program 3 R (*reduce, reuse, recycle*) atau diambil oleh pemulung untuk dijual atau diolah kembali (berita Trans 7, Selasa 27 Januari 2015).

Hal seperti inilah yang mestinya mendapat perhatian lebih, karena kegiatan mendaur ulang sampah oleh sebagian warga DKI Jakarta tersebut dapat dimanfaatkan atau berdampak pada keperluan-keperluan yang baik seperti menciptakan lapangan kerja baru dan membentuk lingkungan yang bersih, indah dan nyaman. Masalah sampah ini merupakan pertautan antara manusia dan lingkungan. Secara konkret nampak bahwa degradasi sumber daya alam dan lingkungan akan berakibat pada penurunan kualitas kehidupan manusia. Oleh karenanya, selain pertumbuhan ekonomi, menyelamatkan lingkungan dan mewariskannya kepada generasi masa depan dalam keadaan baik merupakan tanggung jawab moral dalam kemanusiaan dan merupakan kewajiban semua pihak.

Di titik ini, permasalahan yang nyata adalah antara kebutuhan-kebutuhan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan masalah sampah, memobilisasi sumber daya agar mau mengolah sampah menjadi bernilai ekonomis (proses penyadaran) dan memperkuat warga yang melakukan pengolahan sampah (struktur kelembagaan kelompok) yang dapat mengurangi volume sampah di masa kini tanpa mengabaikan institusi atau pranata-pranata lokal, dengan keperluan mempertahankan kualitas lingkungan yang nyaman serta keberlanjutan dari kelompok warga yang melakukan kegiatan pengolahan sampah. Ketegangan

ini hanya dapat kita jelaskan apabila kita dapat memahami tiga hal dasar yakni *pertama*, praktek dan kebijakan terhadap masalah sampah, *kedua*, kelompok yang anggotanya dihadapkan pada keberlanjutan kegiatan pengolahan sampah dimasa kini dan di masa depan, *ketiga* kemampuan kelompok daur ulang sampah untuk bertindak atas inisiatifnya sendiri dalam mengatasi masalah-masalahnya dan menemukan solusi bagi kelompoknya di masa depan sehingga berdaya dalam lima aspek (power, kognitif, psikologi, ekonomi dan politik).

Kegiatan pengolahan sampah yang dilakukan oleh warga dapat memainkan peranan yang luar biasa untuk menciptakan kota yang indah, karena pengolahan sampah yang dilakukan sebagian warga DKI Jakarta dengan membentuk kelompok daur ulang sampah (bank sampah) merupakan salah satu wujud dari adanya program pembangunan manusia dengan lingkungannya sekaligus bentuk pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan pembentukan kelompok yang menempatkan kekuatan masyarakat sebagai modal utama.

Oleh karena itu perlu pengkajian mendalam mengenai pendekatan yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah pendekatan kelompok karena pembentukkan kelompok merupakan pendekatan yang diyakini mampu memberikan kontribusi dalam jangka panjang yakni upaya pembentukkan kesadaran sosial masyarakat kearah kehidupan yang lebih baik. Strategi pendekatan dan pembelajaran kelompok pada kegiatan mengatasi masalah sampah di DKI Jakarta selama ini jarang disentuh. Padahal kita tahu bahwa melalui pendekatan dan pembelajaran kelompok atau lebih tepatnya melalui kekuatan kelompok akan memiliki potensi untuk memampukan masyarakat di dalam memecahkan problematika sampah dan sekaligus masalah lingkungan dan kemiskinan di DKI Jakarta yang selama ini mereka hadapi.

Dalam kehidupan sehari-hari kegiatan pemberdayaan ini secara nyata banyak dilakukan oleh pelaksana pembangunan dan masyarakat itu sendiri. Kegiatan-kegiatan kelompok masyarakat, pemerintah dan LSM pada dasarnya adalah bentuk program pemberdayaan. Hanya saja perlu diperhatikan bahwa program-program tersebut mempunyai bentuk, tujuan dan metode yang berlainan. Oleh karena itu penelitian ini menekankan pada menemukan dan memahami

secara mendalam mengenai upaya mengatasi masalah kemiskinan dan lingkungan (pengelolaan sampah) di DKI Jakarta melalui pemberdayaan masyarakat hingga mencapai tahap pemandirian masyarakat dengan menggunakan strategi atau pendekatan kelompok. Mengingat pendekatan kelompok merupakan salah satu metode yang cocok untuk diimplementasikan karena sesuai dengan kultur bangsa Indonesia.

B. Rumusan Masalah Penelitian.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu untuk mengkaji pendekatan kelompok dalam pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan daur ulang sampah kaitannya dengan pembangunan sumber daya manusia di wilayah DKI Jakarta dengan mengajukan pertanyaan "Bagaimana pendekatan kelompok yang dilakukan dalam upaya pemberdayaan masyarakat di DKI Jakarta?". Untuk menjawab pertanyaan utama tersebut dibutuhkan rumusan masalah sebagai pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana kondisi pemberdayaan daur ulang sampah di DKI Jakarta?
2. Bagaimana mekanisme pendekatan kelompok dalam pemberdayaan masyarakat di DKI Jakarta?
3. Bagaimana model hipotetik pendekatan kelompok dalam pemberdayaan masyarakat ?

C. Tujuan Penelitian.

Penelitian ini secara umum ingin memahami dan menemukan bagaimanakah pendekatan kelompok dalam pemberdayaan masyarakat melalui daur ulang sampah kaitannya dengan pembangunan sumber daya manusia di wilayah DKI Jakarta.

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah ingin memahami dan menemukan:

1. Kondisi pemberdayaan daur ulang sampah di DKI Jakarta

2. Mekanisme pendekatan kelompok dalam pemberdayaan masyarakat di DKI Jakarta
3. Model hipotetik pendekatan kelompok terhadap pemberdayaan masyarakat

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan, dapat diharapkan memberikan manfaat baik ditinjau secara teoritis maupun ditinjau secara praktis:

1. Manfaat ditinjau dari segi teoritis:
   a) Hasil penelitian memberikan kontribusi pemikiran tentang Pendidikan Non formal, khususnya Pemberdayaan Masyarakat sebagai kajian utama yang bertujuan untuk memperbaiki - *to improve* - kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik.
   b) Hasil penelitian lain memberikan konsep tentang pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan kelompok yang memberikan reorientasi pada aspek efektivitas dari proses dan prosedur pemberdayaan masyarakat yang melibatkan aparat birokrasi, masyarakat maupun seluruh *stake holder*. Konsep pemberdayaan dengan pendekatan kelompok ini bertujuan agar pelaksanaan dan penjabaran pemberdayaan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam filosofi yang mendasarinya, sebagai prasyarat agar proses pemberdayaan dapat berjalan dengan baik.
   c) Berbasis wirausaha pada masyarakat perkotaan, yang di dalamnya terdapat proses pembelajaran bagi orang dewasa berupa pemindahan dan pembentukan jiwa wirausaha secara berkelanjutan sebagai bagian dari sasaran pengembangan program-program Pendidikan Non formal. Contohnya adalah proses produksi dan distribusi daur ulang sampah di kota.
2. Manfaat ditinjau dari segi praktis:
   a) Bentuk pemberdayaan masyarakat ini dapat digunakan sebagai acuan program pembangunan bidang Pendidikan Non formal khususnya

dalam memberdayakan masyarakat perkotaan dalam memperbaiki peningkatan pendapatan dengan wirausaha daur ulang sampah.

b) Model pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan kelompok ini perlu disebarluaskan pada daerah-daerah perkotaan yang memiliki berbagai permasalahan terkait dengan proses daur ulang sampah.

3. Manfaat bagi penelitian selanjutnya:

a) Temuan tentang model pemberdayaan masyarakat dalam kaitannya dengan pembangunan sumber daya manusia di wilayah DKI Jakarta dengan pendekatan kelompok dapat dijadikan obyek kajian secara berkelanjutaan bagi peneliti yang ingin mendalami.

b) Kehidupan masyarakat perkotaan selalu memerlukan pengkajian dan penelitian sebagai salah satu diantara alternatif upaya menemukan teori-teori pemberdayaan masyarakat khususnya melalui pendekatan kelompok.

E. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dalam disertasi ini terdiri atas lima bab yaitu bab satu berisi pendahuluan, bab dua berisi kajian pustaka, bab tiga berisi metode penelitian, bab empat berisi temuan penelitian dan pembahasan serta bab lima berisi kesimpulan dan rekomendasi. Untuk lebih jelasnya berikut ini uraian dari masing-masing bab :

1) Bab satu adalah pendahuluan terdiri atas latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Latar belakang penelitian berisi uraian mengenai fokus penelitian yaitu pendekatan kelompok dalam pemberdayaan masyarakat. Rumusan masalah penelitian berisi uraian mengenai pertanyaan utama dalam penelitian yaitu bagaimana pendekatan kelompok yang dilakukan dalam upaya pemberdayaan masyarakat di DKI Jakarta, dan pertanyaan pengarah yaitu (a) bagaimana kondisi pemberdayaan daur ulang sampah di DKI Jakarta, (b) bagaimana mekanisme pendekatan kelompok dalam pemberdayaan masyarakat di DKI Jakarta, (c) bagaimana model hipotetik pendekatan kelompok dalam pemberdayaan masyarakat. Tujuan penelitian

berisi uraian mengenai tujuan secara umum yaitu ingin memahami dan menemukan bagaimanakah pendekatan kelompok dalam pemberdayaan masyarakat melalui daur ulang sampah kaitannya dengan pembangunan sumber daya manusia di wilayah DKI Jakarta dan uraian mengenai tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni ingin memahami dan menemukan: (a) kondisi pemberdayaan daur ulang sampah di DKI Jakarta, (b) mekanisme pendekatan kelompok dalam pemberdayaan masyarakat di DKI Jakarta dan (c) model hipotetik pendekatan kelompok terhadap pemberdayaan masyarakat di DKI Jakarta. Adapun manfaat penelitian berisi uraian mengenai manfaat ditinjau dari segi teoritis, ditinjau dari segi praktis dan manfaat ditinjau dari segi bagi penelitian selanjutnya.

2) Bab dua berisi kajian pustaka terdiri atas uraian sub bab mengenai teori/konsep dari fokus penelitian yakni pemberdayaan masyarakat dan pendekatan kelompok. Teori-teori tersebut terdiri atas hakekat pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan subnya konsep pemberdayaan masyarakat, prinsip pemberdayaan masyarakat, tujuan pemberdayaan masyarakat, dan prosedur pemberdayaan masyarakat, sedangkan hakekat pendekatan kelompok terdiri atas konsep kelompok, dinamika kelompok, keberhasilan kelompok dalam ESD, peran pendekatan kelompok dan *logic model* sebagai mekanisme dalam pendekatan kelompok. Terdapat pula sub bab kedua yaitu penelitian yang relevan dengan uraian berisi kajian-kajian yang relevan untuk digunakan sebagai referensi dalam fokus penelitian guna memperkaya khasanah teori /konsep yang digunakan dalam penelitian ini, dan terakhir terdapat sub bab kerangka pikir penelitian yang berisi uraian mengenai pemikiran peneliti yang dirangkum berdasarkan fenomena masalah yang diteliti dengan berlandaskan pada teori dan kajian-kajian yang dilakukan melalui berbagai penelitian-penelitian yang relevan dengan fokus kajian yang di teliti .

3) Bab tiga berisi metode penelitian, yaitu uraian mengenai tata cara yang bersifat prosedural, yakni bagian yang mengarahkan untuk mengetahui bagaimana peneliti merancang alur penelitiannya mulai dari pendekatan

penelitian yang diterapkan, desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, pengumpulan data, definisi operasional, pengembangan instrumen, analisis data dan keabsahan data.

4) Bab empat berisi hasil penelitian, pembahasan dan temuan penelitian. Pada hasil penelitian berisi uraian hasil wawancara dengan responden, observasi dan studi dokumentasi, bentuknya sesuai dengan urutan rumusan permasalahan penelitian yaitu: (a) bagaimana kondisi pemberdayaan daur ulang sampah di DKI Jakarta, (b) bagaimana mekanisme pendekatan kelompok dalam pemberdayaan masyarakat di DKI. Adapun pembahasan berisi uraian hasil pengolahan dan analisis data dari lapangan berdasarkan pada teori/konsep yang terdapat pada bab dua dengan tujuan menjawab pertanyaan penelitian. Terakhir adalah temuan penelitian, berisi uraian kristalisasi antara hasil penelitian (kondisi empirik) dengan pembahasan hasil penelitian, yakni dirumuskannya model hipotetik pendekatan kelompok dalam pemberdayaan masyarakat.
5) Bab lima berisi kesimpulan dan rekomendasi yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut.